

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia memberikan hak pada setiap warga negara untuk ikut serta berperan memberikan partisipasi politik. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Undang-Undang ini menegaskan bahwa warga negara dari golongan mana saja mempunyai kebebasan dan berhak memberikan kontribusi dalam dunia politik. Akan tetapi kebebasan yang dijunjung tinggi tersebut secara tidak langsung malah menimbulkan dampak buruk dalam berdemokrasi, salah satunya adalah kelahiran politik dinasti.

Secara harfiah politik dinasti merupakan sebagai strategi politik untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah dibangun kepada kalangan keluarga dan kerabat atau dalam bahasa sederhana kekuasaan politik yang dijalankan secara turun-temurun oleh suatu keluarga.<sup>1</sup> Politik dinasti juga dipahami sebagai suatu “kerajaan politik” yang dibangun oleh elit dengan tujuan menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya dalam posisi penting di pemerintahan lokal maupun nasional. Atau bisa dikatakan strategi yang dibentuk oleh elit melalui jaringan yang terstruktur dan sistematis.<sup>2</sup>

Sistem demokrasi yang memberikan hak politik kepada setiap warga negara, menjadi akses maraknya kasus politik dinasti. Kebebasan berpolitik dimanfaatkan oleh aktor politik dinasti untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dibangun. Menurut Karyudi Sutajah Putra, dinasti

---

<sup>1</sup>Sri, Purwanti. 2018. Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Desa (Studi di Desa Wawasan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan) Doctoral dissertation UIN Raden Intan Lampung.

<sup>2</sup> Agustino, Leo. 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Alfabeta. Bandung

politik merebak dikarenakan tiga faktor, yaitu kekuatan modal finansial, kekuatan jaringan, dan posisi dalam partai.<sup>3</sup> Demokrasi yang ideal memberi kesempatan pada setiap rakyat untuk terlibat dalam proses politik serta berpeluang mendapatkan jabatan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun kesempatan untuk ikut berkontestasi tersebut terhalang oleh status sosial akibat adanya fenomena politik dinasti yang menciptakan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan keluarga/kerabat dinasti yang berkuasa untuk menjadi pejabat publik.

Fenomena dinasti politik ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif, kemudian penempatan jabatan strategis terhadap anggota dinasti akibatnya banyak ditemukan elite lokal bertransformasi menjadi elit politik lokal.<sup>4</sup> Jaringan kekuasaan dinasti yang kuat dan menyebar pada suatu daerah akan melahirkan kekuasaan yang absolut karena jaringan politik tersebut dibangun berdasarkan faktor kekerabatan sehingga menghalangi rekrutmen politik dari orang-orang diluar dinasti. Fenomena ini rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti praktik politik balas budi, politik uang, korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta mengancam pergerakan konsolidasi demokrasi.<sup>5</sup> Selain itu Politik dinasti juga menghalangi lahirnya pemimpin yang berkualitas karena menghambat masyarakat untuk ikut dalam kontestasi politik yang di dominasi oleh anggota dinasti penguasa.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.

<sup>4</sup> Zaldi Rusnaedy. 2020. Dinasti Politik di Aras Lokal. Penerbit Deepublish. Yogyakarta

<sup>5</sup> Konsolidasi demokrasi dapat diartikan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama memfasilitasi demokratisasi politik. Adapun unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi antara lain ; lembaga institusi politik, partai politik, elite, kelompok-kelompok kepentingan maupun masyarakat politik. Selain itu unsur lain dalam konsolidasi demokrasi adalah adanya kesepakatan bersama terkait “nilai-nilai politik” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen politik menjadi suatu kekuatan yang padu selama proses transisi menuju demokrasi. *Ibid* hal. 118.

<sup>6</sup> Ilham Ramadhan. 2018. Politik Dinasti di Aceh (Studi Kasus Kabupaten Nagan Raya) skripsi Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Adapun gejala yang mendasari terbentuknya suatu dinasti, menurut Wasisto, pertama ketidakmampuan menjalankan kaderisasi yang baik dari partai politik dalam menjaring calon kepala daerah yang berkualitas sehingga melahirkan pragmatisme politik dengan mendorong kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjadi pejabat publik. Kedua, konteks masyarakat yang menjaga adanya kondisi status quo di daerahnya yang menginginkan kepala daerah untuk berkuasa dengan mendorong keluarga kepala daerah menggantikan petahana.<sup>7</sup>

Pandangan mengenai keberadaan dinasti politik memiliki dua sisi pro dan kontra. Dari sisi pro beranggapan bahwa politik dinasti dapat menjaga kestabilan politik tetapi dari sisi kontra beranggapan bahwa politik dinasti hanya akan menjadi alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan yang telah dibangun dan memanfaatkan tahtanya untuk kepentingan pribadi. Maraknya fenomena politik dinasti sebenarnya sulit untuk disalahkan karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang membatasi perkembangan politik dinasti dan didukung oleh sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih.<sup>8</sup> Terlepas dari berbagai kontra mengenai keberadaan politik dinasti tidak dipungkiri di berbagai wilayah Indonesia dinasti politik masih saja mendominasi dan mendapat banyak dukungan dari masyarakat.

Sebenarnya banyak kajian yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait dengan politik dinasti ini, misalnya Suyadi yang menemukan bahwa politik dinasti di Indonesia merupakan wujud dari perilaku politik (*political behavioralism*). Para aktor politik mengamankan kekuasaan politiknya dengan cara menempatkan kerabat dan keluarga dalam posisi yang strategis baik di bidang formal seperti pemerintahan/pejabat publik, maupun di bidang informal seperti posisi

---

<sup>7</sup>Wasito Raharjo Djati. 2013 Revivalisme Kekuatan Familisme : Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol 18, No 2, Juli 2013 hal 203-231

<sup>8</sup>Nur Hidayat (2014) . Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia *Jurnal Orbith* Vol.10 No 1 Maret 2014 hlm 18-20

strategis dalam bisnis.<sup>9</sup> Konsep tersebut sejalan dengan strategi yang dimainkan oleh dinasti politik yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Dinasti Ratu Atut Chosiyah gubernur Banten periode 2007-2017. Hampir seluruh anggota keluarga besar Ratu Atut menduduki berbagai jabatan strategis baik itu legislatif maupun eksekutif. Meskipun Ratu Atut tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013 lalu, dinasti keluarganya tetap saja mengakar.<sup>10</sup>

Dalam studinya Mietzner mengatakan bahwa pemimpin politik di Indonesia pasca masa Orba mempunyai kecenderungan mempersiapkan kerabat untuk melanjutkan tonggak kepemimpinan di masa selanjutnya.<sup>11</sup> Gejala ini bisa dilihat dari banyak bermunculan keluarga atau kerabat, dari pemimpin yang menjadi pejabat publik seperti Puan Maharani, Agus Yudhoyono, Gibran Rakabuming. Di tingkat lokal jaringan keluarga menyebar ke dalam berbagai sektor baik formal sebagai pejabat publik maupun informal sebagai pelaku bisnis. Regenerasi aktor muda yang muncul dari kalangan keluarga penguasa merupakan bentuk dari investasi jangka panjang aktor penguasa dengan mempersiapkan penggantinya untuk ikut serta dalam proses politik. Hal tersebut diidentifikasi bahwa dalam politik dinasti kekuasaan harus dipegang oleh garis keturunan yang sama.<sup>12</sup>

Hidayati mengatakan bahwa aktor politik dinasti mengerahkan power kekuasaan dan modal yang dimilikinya untuk mempengaruhi dan memobilisasi rakyat. Sudah lazim pada setiap kontestasi Pilkada para petahana (*incumbent*) sulit untuk dikalahkan karena pengaruh kekuasaan yang kuat. Fenomena dinasti politik secara prosedural memang tidak bisa disalahkan, namun

---

<sup>9</sup>Suyadi. (2014). Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

<sup>10</sup>Mhd. Al Fahjri Sukri. Dinasti Politik di Banten : Familisme Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol.10 No 2, 2020 (169-190)

<sup>11</sup>Marcus Mietzner merupakan akademisi yang memprakarsai penggunaan istilah dinasti politik dalam mbingkai konstelasi sosial politik Indonesia pasca demokrasi langsung.

<sup>12</sup>Wasisto Raharjo Djati. Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal. *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol.18 No 2 Juli 2013 203-231

persoalannya menyangkut kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi rekrutmen calon kepala daerah, ini terlihat dari dominannya keterlibatan sejumlah calon petahana (*incumbent*) dalam pilkada.<sup>13</sup>

Penelitian tentang dinasti politik ini sebagian besar membahas keuntungan yang didapatkan dari kelompok dinasti politik seperti *privilege* guna mempertahankan kekuasaan yang dibangun oleh anggota keluarga/kerabat. Selain itu dinasti politik merupakan kolaborasi sesama aktor/elit politik yang mempunyai kekuatan politik dan menguasai sistem politik tempat mereka berkuasa. Kekuasaan yang diduduki oleh dinasti politik biasanya sulit untuk digulingkan, karena mereka memiliki basis massa yang solid, modal politik, dan ekonomi yang kuat. Akibatnya dinasti politik ini mendapat dukungan dari masyarakat dan sulit untuk dikalahkan, meskipun banyak calon di luar dinasti yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini mengkaji mengenai kekalahan dinasti politik yang telah berkuasa kurang lebih 20 tahun di Kabupaten Batang Hari, yaitu dinasti Abdul Fattah dan dinasti Syahirsyah. Pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Batang Hari tahun 2020 kedua dinasti tersebut dikalahkan oleh calon baru. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 58 Huruf O kepala daerah mempunyai batas maksimal untuk menjabat dan mencalonkan diri, yaitu selama dua periode, peraturan ini ditujukan untuk menghindari pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang maupun suatu dinasti. Aktor dinasti yang ada berupaya melanjutkan estafet kekuasaan kepada anggota dinastinya. Masa jabatan yang dijalankan oleh petahana dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan kekuasaan melalui *patron-client* baik antara kepala daerah dengan staf bawahan, maupun kepala daerah dengan elit informal di daerah kekuasaannya. Jelas terlihat bahwa dinasti politik memiliki peran penting sebagai kekuatan bagi aktor politik dinasti untuk mempertahankan kekuasaan melalui

---

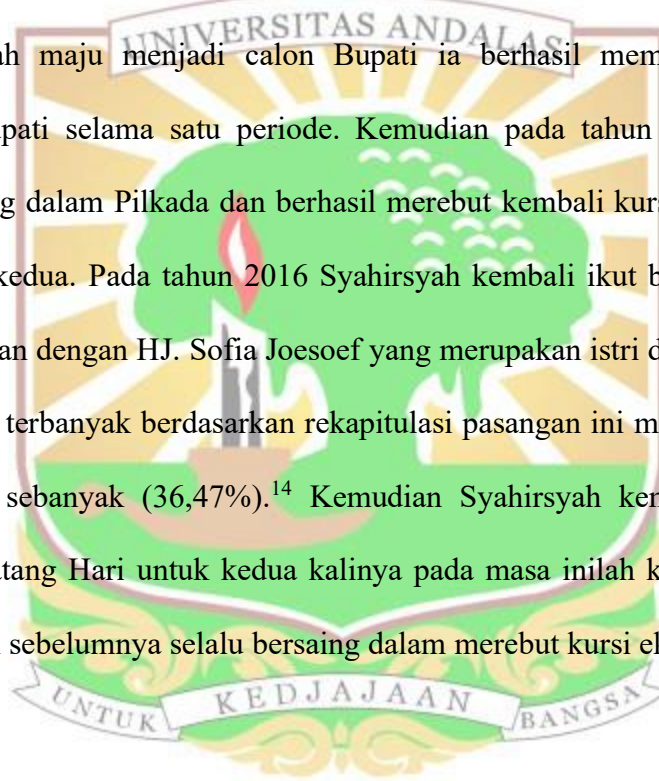
<sup>13</sup>Hidayati, Khozanah, Mengkritisi Politik Dinasti dalam PemiluKada.  
<https://khozanah.wordpress.com/2010/07/28/mengkritisi-politik-dinasti-dalam-pemilukada/> Diakses 13 September 2021

maju ke pemilihan umum karena mempunyai kematangan modal politik dan ekonomi. Menariknya penelitian ini justru melihat kegagalan politik dinasti dalam menyelamatkan kekuasaan yang telah dibangun selama 20 tahun lebih di Kabupaten Batang Hari.



## 1.2 Rumusan Masalah

Kecenderungan politik dinasti sepertinya banyak menyebar ke seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi. Di Kabupaten Batang Hari terdapat dua dinasti yang hampir kurang lebih 20 tahun menduduki kursi kepala daerah secara bergantian yaitu dinasti Fattah dan dinasti Syahirsyah. H. Abdul Fattah S.H pernah menjabat sebagai bupati Batang Hari berpasangan dengan Ir. Syahirsyah SY sebagai Wakil Bupati tahun 2001-2006. Pada tahun 2006 Syahirsah maju menjadi calon Bupati ia berhasil memenangkan Pilkada dan menjabat sebagai Bupati selama satu periode. Kemudian pada tahun 2011 H. Abdul Fattah kembali ikut bertarung dalam Pilkada dan berhasil merebut kembali kursi kekuasaan ia kembali menjabat di periode kedua. Pada tahun 2016 Syahirsyah kembali ikut bertarung dalam Pilkada Batanghari berpasangan dengan HJ. Sofia Joesoef yang merupakan istri dari H. Abdul Fattah dan berhasil meraih suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi pasangan ini memperoleh 50.802 suara atau dipresentasikan sebanyak (36,47%).<sup>14</sup> Kemudian Syahirsyah kembali menjabat sebagai Bupati Kabupaten Batang Hari untuk kedua kalinya pada masa inilah kedua dinasti Fattah dan Syahir bersatu setelah sebelumnya selalu bersaing dalam merebut kursi eksekutif daerah.



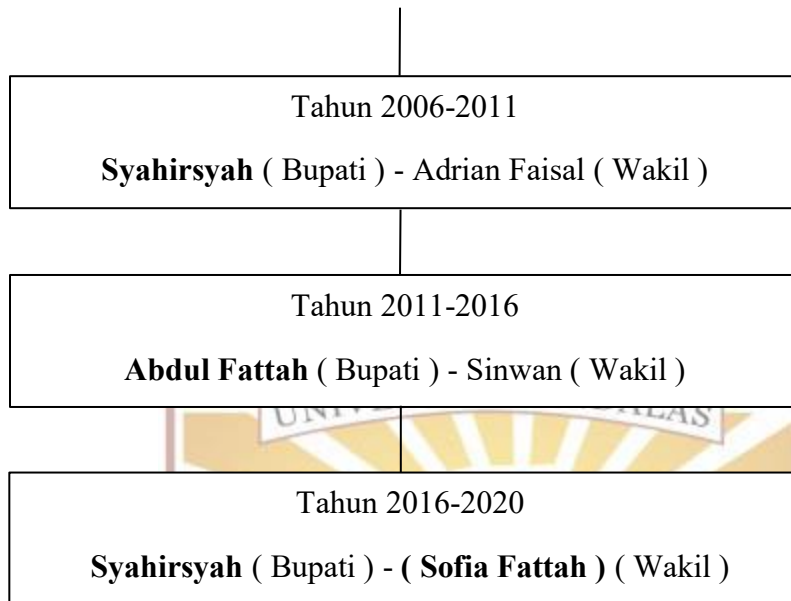
### Bagan 1.1

#### Periode dinasti Fattah dan Syahir

<sup>14</sup>KPU. *Pilkada* 2021

Tahun 2001-2006 <b>Abdul Fattah ( Bupati ) - Syahirsyah ( Wakil )</b>
--

[ikab](#). Diakses Pada 25 Maret



*Sumber Diolah Peneliti Pada Tahun 2021*

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 Dinasti Fattah dan Syahir kembali mengusung anggota keluarga untuk bertarung dalam kontestasi politik dan maju sebagai calon Bupati. Bursa pencalonan Pilkada Kabupaten Batanghari di isi oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari. Pasangan pertama dengan nomor urut 1 adalah Yuninta Asmara ( istri dari Syahirsyah) dan M. Mahdan kedua nya merupakan anggota aktif DPRD kabupaten Batang Hari periode 2019-2024. Yuninta Asmara menjabat sebagai wakil ketua 1. Sedangkan Mahdan yang tergabung dalam komisi 1 fraksi PAN pernah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Batang Hari periode 2014-2019. Mahdan juga merupakan adik ipar dari wakil Bupati Batang Hari periode 2013-2016 Sinwan yang saat itu berpasangan dengan Abdul Fattah. Pasangan ini Diusung oleh Partai Golkar, PDIP, dan Gerindra.



Kemudian di nomor urut 2 pasangan dr. Muhammad Firdaus Fattah MARS ( anak dari Abdul Fattah) dan Camelia Puji Astuti, S.Sn, MA. Firdaus Fattah merupakan seorang dokter yang maju sebagai calon bupati menggantikan adiknya Hafiz Fattah yang gagal mencalonkan diri. Camelia menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Batang Hari dan anggota DPRD Batanghari periode 2019-2024. keduanya merupakan anak mantan Bupati Batang Hari dengan periode berbeda yakni Abdul Fattah (2001-2003) dan Hasip Kalimudin Syam bupati Batang Hari periode 1980-1991 dan Wakil Gubernur Jambi periode 1994-2004. Pasangan ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sosial (PKS).



*Sumber Diolah Peneliti Pada Tahun 2021*

Pasangan terakhir dengan Nomor urut 3 di isi oleh M. Fadhil Arief dan Bahktiar keduanya memiliki latar belakang sebagai birokrat, dengan jabatan Sekretaris Daerah (SEKDA) M. Fadhil Arief sebagai sekretaris daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Bahktiar sekretaris daerah Kabupaten Batang Hari. Pasangan ini merupakan satu-satunya calon yang bebas dari dinasti

politik dan sosok baru dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Batang Hari. Fadhil - Bakhtiar diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Batang Hari hampir selalu disuguhkan oleh nama Abdul Fattah dan Syahirsyah. Kursi pencalonan yang selalu di isi dan dimenangkan oleh dua dinasti yang berkuasa secara bergantian selama 4 periode. Keduanya sama-sama mempunyai militan, modal, dan pengaruh yang besar untuk memperoleh suara dari masyarakat Kabupaten Batang Hari, padahal pada setiap kontestasi Pilkada Batang Hari selalu ada lawan baru yang berupaya merubah sistem kekuasaan dinasti politik di Batang Hari.

Hal yang sama terulang kembali Pada Pilkada Kabupaten Batang Hari 2020, dinasti Fattah dan Syahir kembali mengusung anggota keluarga untuk ikut maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Menariknya kedua dinasti memiliki pola baru yang sama, yaitu melalui politik kekerabatan berkolaborasi antar dinasti lama dan baru. Yuninta Asmara (istri Syahirsyah) berpasangan dengan Mahdan (adik ipar Sinwan), Firdaus Fattah (anak Abdul Fattah) berpasangan dengan Camelia (anak Hasip Kalimuddin). Akan tetapi kekuasaan yang telah dibangun oleh dinasti Abdul Fattah dan dinasti Syahirsyah selama beberapa periode berhasil ditumbangkan oleh pasangan calon Fadhil – Bakhtiar.

Fadhil-Bakhtiar merupakan penantang dan nama baru yang muncul di ranah kontestasi pilkada Kabupaten Batang Hari, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pasangan ini memiliki latar belakang sebagai birokrat, tidak mempunyai jejak sebagai politikus serta tidak ada keterkaitan dengan dinasti Fattah dan dinasti Syahirsyah. Akan tetapi Fadhil – Bakhtiar berhasil unggul dari anak Abdul Fattah dan istri Syahirsyah dengan memperoleh 60.842 suara.

**Tabel 1.1 Hasil Perolehan Suara Pada Pilkada Kabupaten Batanghari Tahun 2020**

No Urut	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1	Yuninta Asmara-Mahdan	50.486
2	Firdaus-Camelia	49.528
<b>3</b>	<b>Fadhil-Bakhtiar</b>	<b>60.842</b>

*Sumber : KPUD Batanghari*

Keunggulan Fadhil-Bakhtiar berhasil memutuskan politik dinasti yang beberapa periode ke belakang kerap dipegang oleh petahana.<sup>15</sup> Kemenangan pasangan ini menjadi sejarah baru di ranah politik Kabupaten Batang Hari karena keduanya berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti politik yang selalu bergantian berkuasa di Kabupaten Batang Hari selama dua dekade ke belakang.<sup>16</sup> Berdasarkan fakta pergerakan tim sukses Fadhil-Bakhtiar selalu menyuarakan isu “Tolak Dinasti” di lapangan maupun sosial media yang selalu digaungkan sebagai jargon tim untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Salah seorang militan perjuangan Fadhil-Bakhtiar mengatakan secara terang-terangan pada saat pengukuhan tim bahwa Kabupaten Batang Hari harus dipimpin oleh sosok baru karena masyarakat ingin menghentikan politik turun temurun, dinasti politik yang terus menerus berkuasa akan menghambat kemajuan daerah.<sup>17</sup>

Jika dilihat dari pendekatan psikologis dimana adanya ketertarikan terhadap kandidat atau partai yang mempengaruhi orientasi politik seseorang. Selain bebas dari dinasti Fadhil-Bakhtiar juga merupakan pasangan yang berkompeten dan berpengalaman di bidang birokrasi dibanding pasangan Yuninta-Mahdan dan Firdaus-Camelia yang hanya memanfaatkan nama besar dari masing-masing keluarga yang pernah berkuasa sebelumnya. Kehidupan pribadi Fadhil-Bakhtiar juga sangat sederhana berbeda dengan kedua dinasti yang bergelimang harta. Hal tersebut

<sup>15</sup>Daerah.sindonews.com. Unggul Hitung Cepat, Fadhil-Bakhtiar Runtuhkan Dinasti di Batanghari Jambi. <https://www.google.co.id/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/263342/174/unggul-hitung-cepat-fadhil-bakhtiar-runtuhkan-dinasti-di-batanghari-jambi-1607580756>. Diakses pada 16 september 2021

<sup>16</sup>Rri.co.id. Politik Dinasti Tak Lagi Bertaji, Ini Datanya. <https://m.rri.co.id/nasional/pilkada-2020/946162/politik-dinasti-tak-lagi-bertaji-ini-datanya>. Diakses pada 16 september 2021

<sup>17</sup>Jambiseru.com. H Arzanil Singgung Soal Politik Uang dan Politik Dinasti. <https://www.jambiseru.com/berita/2020/27/10/h-arzanil-singgung-soal-politik-uang-dan-politik-dinasti> Diakses pada 16 September 2021

menjadi dorongan psikologis masyarakat untuk menentukan pilihannya kepada pasangan Fadhil-Bakhtiar.

Kemudian, pendukung Fadhil-Bakhtiar mengkampanyekan slogan “Arah Baru Batang Hari” dan “Tolak Dinasti” yang mendorong ketertarikan masyarakat Batang Hari untuk memilih sosok pemimpin baru karena selama 20 tahun kepemimpinan dinasti tidak terlalu membawa dampak yang signifikan terhadap kemajuan daerah maupun masyarakat, kemenangan pasangan Fadhil-Bakhtiar melawan trah dinasti membuktikan bahwa masyarakat Batanghari sadar akan dampak dinasti politik yang cukup lama berkuasa di daerahnya.

Berikut beberapa hasil tangkapan layar isu anti politik dinasti yang disuarakan oleh tim Fadhil-Bakhtiar di grup publik di halaman Facebook dan Instagram.

 **Suaro Rakyat Batanghari (SRB)**  
Amran Kulup · 27 Sep 2020 · 📷

2000-2005 Fattah - sahirsyah (yuninta)  
2005-2010 Sahirsyah (yuninta)- Aan  
2010-2015 Fattah - Sinwan (mahdan) adik ipar  
2015-2020 Sahirsyah (yuninta) - sofia (fattah)

2020 -2024  
1. Yuninta (sahirsyah) - mahdan (sinwan)  
2. Firdaus (Fattah) - camelia (hasip)  
3. Fadhil - bahtiar (Baru)

20 tahun kabupaten Batang hari di pimpin oleh dinasti politik tutun temurun dan itu2 saja. Apakah kabupaten ini kekurangan figur seorang pemimpin atau memang kekuasaan ini harus tetap di pertahankan oleh mereka para penguasa dinasti.  
Akankah ada keajaiban baru yang akan merubah tatanan dinasti politik ini ke depan nya. Kita nantikan peran serta masyarakat untuk berpikir jernih menentukan pilihan untuk Batang hari yg kita cintai.

...  **Khusaini Husen Ogd bersama Milenial Serumpun Terusan dan 24 lainnya di Roemah Djoeng Arah Baru Batanghari.**  
6 Okt 2020 · Kota Jambi, Jambi · 🌐

Mereka tegas karena mereka sadar Batanghari semakin terkekang dan lamban ditengah lingkaran Dinasti

#Pemuda Perubahan Arah Baru  
#Tolak Dinasti



**Publish Gempar Jambi**  
25 Nov 2020 · 🌐

Nak dekat2 pemilihan ko bae masih jgo main buang honorer dan ASN yg tidak bersalah. Ni lah salah satu imbas dari Dinasti Politik Keluarga Berkuaso. Ego masing2 Trah terlalu tinggi. Ngeri 😬😬😬. Dan kini saatnyo masy sambut sang pembawa perubahan pemimpin baru...



**Suara Rakyat Batanghari (SRB)**  
Putra Milenial Batanghari · 30 Sep 2020 · 🌐

MARI BERLOGIKA DENGAN FAKTA

Apa yang Membuat DINASTI POLITIK menguntungkan masyarakatnya??

Jika melihat fakta yang pernah terjadi di sejumlah daerah di Jawa, Kemunduran yang ada.

Bahkan perEkonomian menurun drastis.

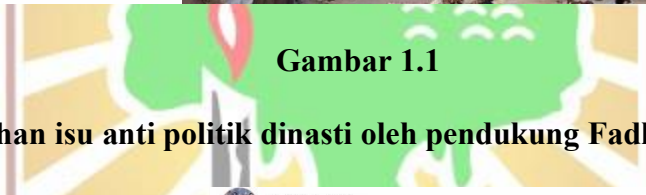
DINASTI POLITIK ajang PESTA PORa TIKUS PROYEK DAN KRONI2 NYA.

Rekayasa PROYEK, KKN dan pembodohan Masyarakat, Siapa bertolak belakang, PECAT Dan DIPINDAHKAN.

Dalam ARAH BARU PERUBAHAN, Lapangan Pekerjaan dan dibukanya Balai Pelatihan Kerja (BLK) bagi MILENIAL akan lebih memudahkan Mendapatkan Pekerjaan bagi MILENIAL, karena DI BLK, akan mendapatka keterampilan dan Ijazah/sertifikat yang pastinya semua lapangan pekerjaan akan menerimanya.

CUKUPLAH YANG LAMA MEMBUAT SENGSAARA DENGAN TANGAN BESINYA DAN JANJII2.

RUBAH BATANGHARI DENGAN ARAH BARU YANG LEBIH BAIK.



## Unggahan isu anti politik dinasti oleh pendukung Fadhil-Bakhtiar

**Publish Gempar Jambi bersama Zulva Fadhil dan 5 lainnya.**  
21 Jul 2020 · 🌐

Yang digaung2kan masyarakat tentang tolak dinasti sebenarnya lebih kepada apa yang mereka alami dan rasakan selama 20 tahun terakhir dipimpin oleh orang yang masuk dalam Trah Dinasti tadi. Bukan melarang Trah dinasti kembali mencalonkan diri. Dan mungkin penantian mereka dengan adanya sosok FB dianggap pas bagi mereka saat ini... 😬🙏🙏🙏



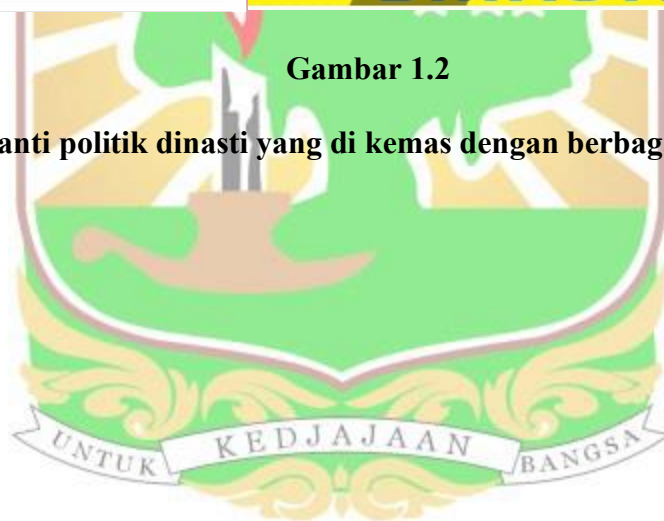
41 suka  
fadhil.bakhtiar Kebangkitan Rakyat Batang Hari, Jayalah Bangsa!!!

#ARAHBARUBATANGHARI  
#FADHILBAKHTIAR  
#SALAMPERUBAHAN



Gambar 1.2

Isu anti politik dinasti yang di kemas dengan berbagai tagline



Inilah yang mendasari mengapa penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada pertanyaan. :

1. Bagaimana pendukung pasangan Fadhil-Bakhtiar mengelola isu anti politik dinasti dalam Pilkada dan memenangkannya ?
2. Adakah strategi khusus yang dilakukan tim pendukung dalam membangun kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Batang Hari terkait dengan keberadaan politik dinasti ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan isu anti politik dinasti dalam Pilkada yang dimenangkan oleh Pasangan Fadhil-Bakhtiar
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan strategi yang digunakan dalam membangun kesadaran politik masyarakat terkait bahaya politik dinasti tersebut

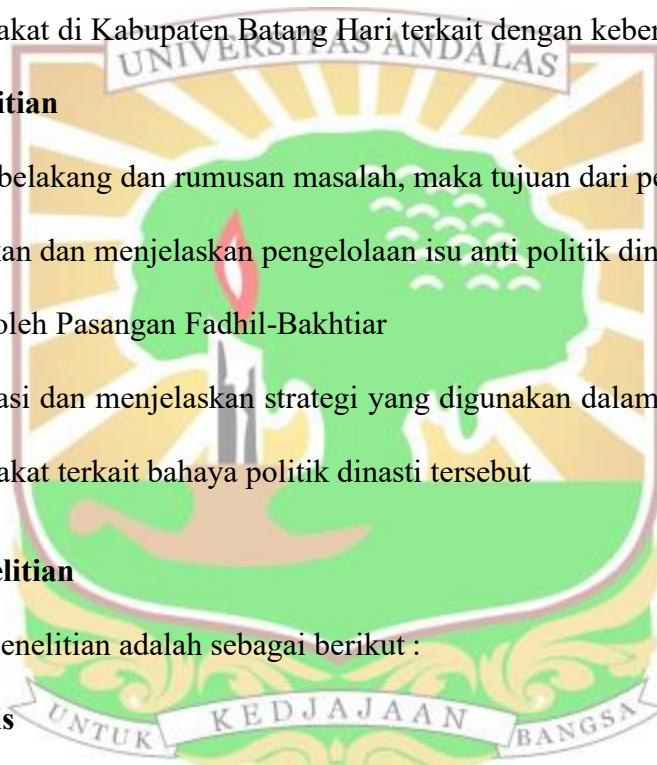
### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1.4.1 Teoritis**

Sebagai bahan untuk pengembangan teoritik pada kajian isu politik dinasti dan kesadaran politik masyarakat tentang bahaya politik dinasti serta dapat memberikan sumbangan yang besar bagi disiplin ilmu politik dan pengembangan ide baru seputar isu politik dinasti dalam pelaksanaan Pilkada. Selanjutnya menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang akan mendalami persoalan isu politik dinasti dalam pelaksanaan Pilkada

#### **1.4.2 Praktis**



Diharapkan dapat memberikan penjelasan dan informasi kepada pembaca mengenai dinamika dan pengaruh isu politik dinasti terhadap kemenangan paslon Fadhil Bakhtiar pada Pilkada Batang Hari tahun 2020

